



PEKAN SURVEY NASIONAL LAPORAN HASIL SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI 1 JANUARI - 3 MEI 2024

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Jalan Diponegoro, Kel. Wolomarang, Kec. Alok Barat, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur - 86115



(0382) 21134/ 23514



pa-maumere.go.id



pa.maumere@gmail.com



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
D. Rencana Kerja	3
BAB II METODOLOGI	5
A. Metode Penelitian	5
B. Populasi dan Sampel	5
C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	5
D. Teknik Pengumpulan Data dan <i>Quality Control</i>	5
E. Teknik Analisis Data	6
F. Tahapan Pelaksanaan	6
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
A. Profil Responden	9
1. Tingkat Pendidikan Responden	9
2. Pekerjaan Responden	10
3. Kelompok Usia Responden	Error! Bookmark not defined.
4. Layanan yang Digunakan	10
B. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator	11
1. Indikator Manipulasi Peraturan	11
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan	12
3. Indikator Menjual Pengaruh	13
4. Indikator Transparansi Biaya	14
5. Indikator Transaksi Rahasia	15
6. Indikator Biaya Tambahan	Error! Bookmark not defined.
7. Indikator Hadiah	Error! Bookmark not defined.
8. Indikator Transparansi Pembayaran	Error! Bookmark not defined.
9. Indikator Percaloan	Error! Bookmark not defined.
10. Indikator Perbuatan Curang	Error! Bookmark not defined.
C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan	16
D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan	17
E. Kuisisioner IPAK 2023	18
BAB IV PENUTUP	19
A. Hasil Survei Persepsi Korupsi	20
B. Tindak Lanjut Yang Dilakukan	20

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada satuan kerja Pengadilan Agama Maumere berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan dilakukannya Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang menghasilkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. ZI menuju wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

D. Rencana Kerja

1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.

b. Penyiapan Bahan

- 1) Kuisisioner
- 2) Bagian dari kuisisioner/pengantar
- 3) Kelengkapan peralatan.

c. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- 1) Jumlah Responden.
- 2) Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

d. Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- a. Isian data terhadap 5 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- b. Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- c. Pengujian kualitas dan validitas data.
- d. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu mulai tanggal 1 Januari – 3 Mei 2024 sesuai dengan Surat Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT.1/IV/2024 tentang Pekan Survey Nasional melalui aplikasi SURVELAG dengan alamat website yang tertera yaitu <https://survei.badilag.net/main> .

BAB II METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu PTSP Pengadilan Agama Maumere.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data dan *Quality Control*

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi secara elektronik tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 5 bulan atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan diolah secara otomatis melalui aplikasi SURVELAG.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, mempersilahkan responden mengisi kuisisioner, meneliti kuisisioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

E. Teknik Analisis Data

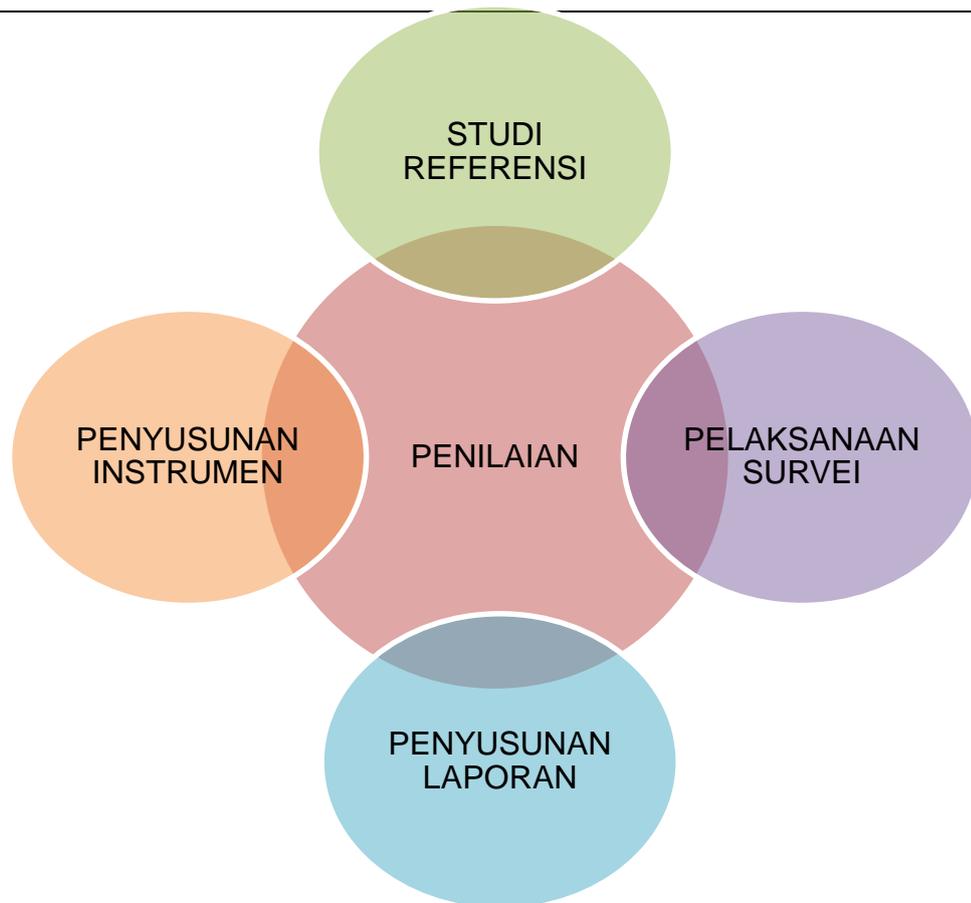
Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuisisioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini;
2. Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator;
3. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 – 100;
4. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

F. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 2. 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas

Tabel 2. 1
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No.	Ruang lingkup
1	Diskriminasi pelayanan
2	Pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan
3	Penerimaan imbalan di luar ketentuan yang berlaku
4	Pungutan liar (pungli) pada unit layanan
5	Percaloan/perantara tidak resmi

Tabel 2. 2
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	1	Tidak bersih dari korupsi
2	2,60-3,064	65,00-76,60	2	Kurang bersih dari korupsi
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	4	Bersih dari korupsi

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

A. Profil Responden

1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di satuan kerja Pengadilan Agama Maumere mayoritas memiliki latar pendidikan SD kebawah sebesar 42% dan SLTA sebesar 42%.

Tabel 3. 1
Tingkat pendidikan responden

Ket	Jumlah	Persentase
1. Tidak sekolah	1	2,33%
2. SD kebawah	15	34,88%
3. SLTP	3	6,98%
4. SLTA	11	25,58%
5. D1/D2/D3/D4	0	0%
6. S1	10	23,26%
7. S2 keatas	3	6,98%
TOTAL	42	100%



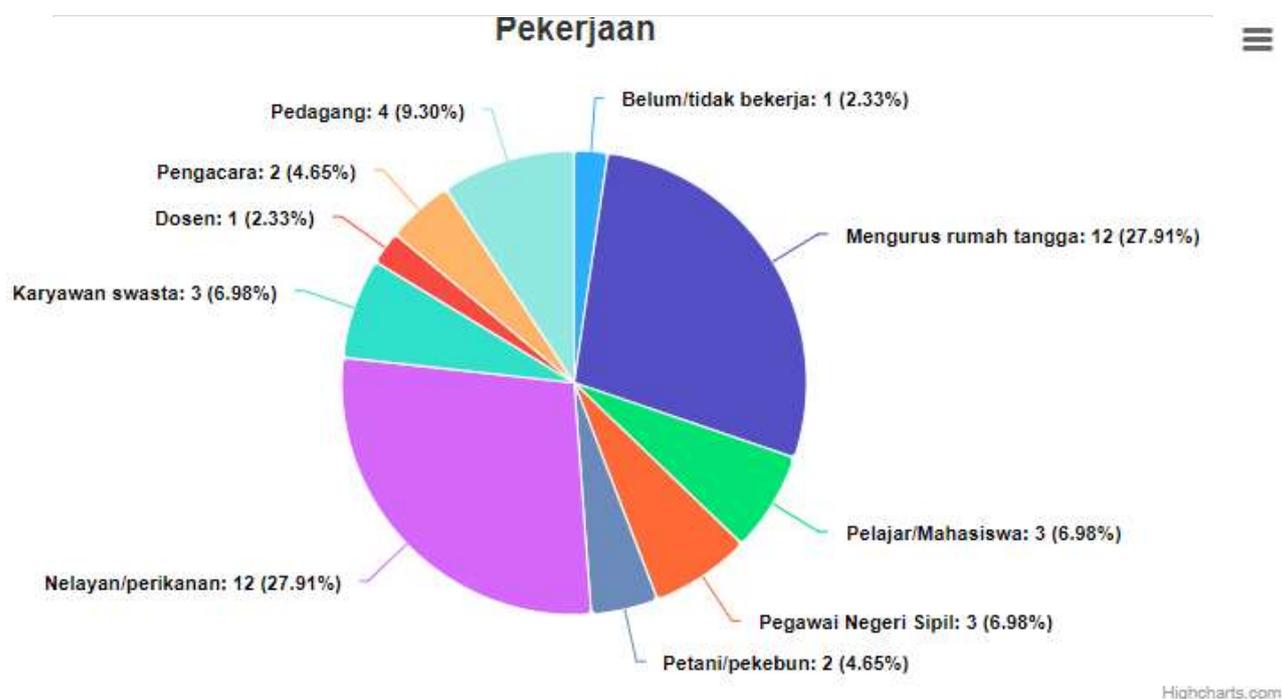
Gambar 3. 1
Diagram Persentase Tingkat Pendidikan Responden

2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 54% Responden pengguna layanan pada satuan kerja Pengadilan Agama Maumere berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga/ Mengurus Rumah Tangga.

Tabel 3. 2
Jenis Pekerjaan Responden

	Ket	Jumlah	Persentase
1	Belum/tidak bekerja	1	2,33%
2	Mengurus rumah tangga	12	27,91%
3	Pelajar/mahasiswa	3	6,98%
4	Pegawai Negeri Sipil	3	6,98%
5	Petani/pekebun	2	4,65%
6	Nelayan/perikanan	12	27,91%
7	Karyawan Swasta	3	6,98%
8	Dosen	1	2,33%
9	Pengacara	2	4,65%
10	Pedagang	4	9,30%
	TOTAL	42	100%



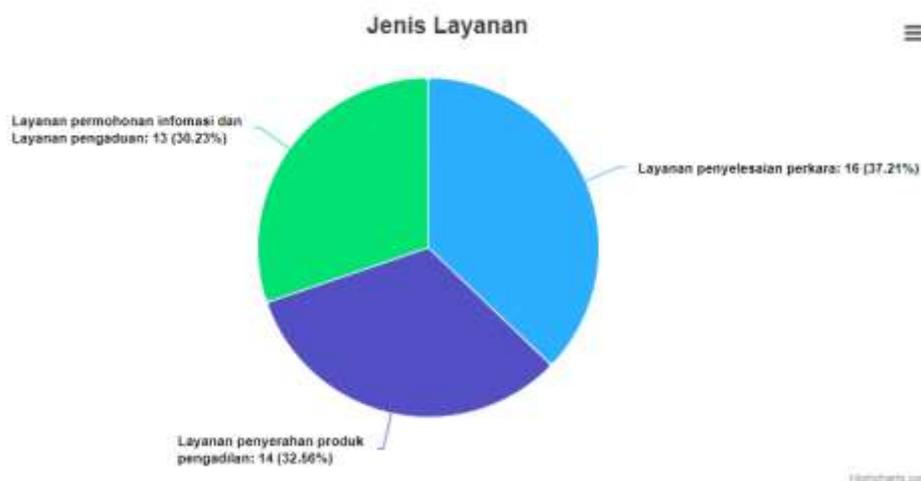
Gambar 3. 2
Diagram Persentase Jenis Pekerjaan Responden

3. Layanan yang Digunakan

Layanan yang digunakan oleh responden dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Maumere menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah penerima layanan terkait penyelesaian perkara yaitu sebesar 16 responden.

Tabel 3. 3
Jenis Layanan

Ket	Jumlah	Persentase
Layanan Penyelesaian Perkara	16	37,21%
Layanan Penyerahan Produk Pengadilan	14	32,56%
Layanan Permohonan Informasi dan Pengaduan	13	30,23%
TOTAL	42	100%



Gambar 3. 3
Diagram Persentase Jenis Layanan

B. Indeks Persepsi Korupsi untuk Setiap Indikator

1. Indikator Diskriminasi Pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Diskriminasi Pelayanan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,88**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI** dari Diskriminasi Pelayanan.

Tabel 3. 4
Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan

No.	Indeks Persepsi	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat buruk	0	0%
2.	Buruk	0	0%
3.	Baik	4	9,5%
4.	Sangat baik	38	90,5%
	Jumlah	42	100%



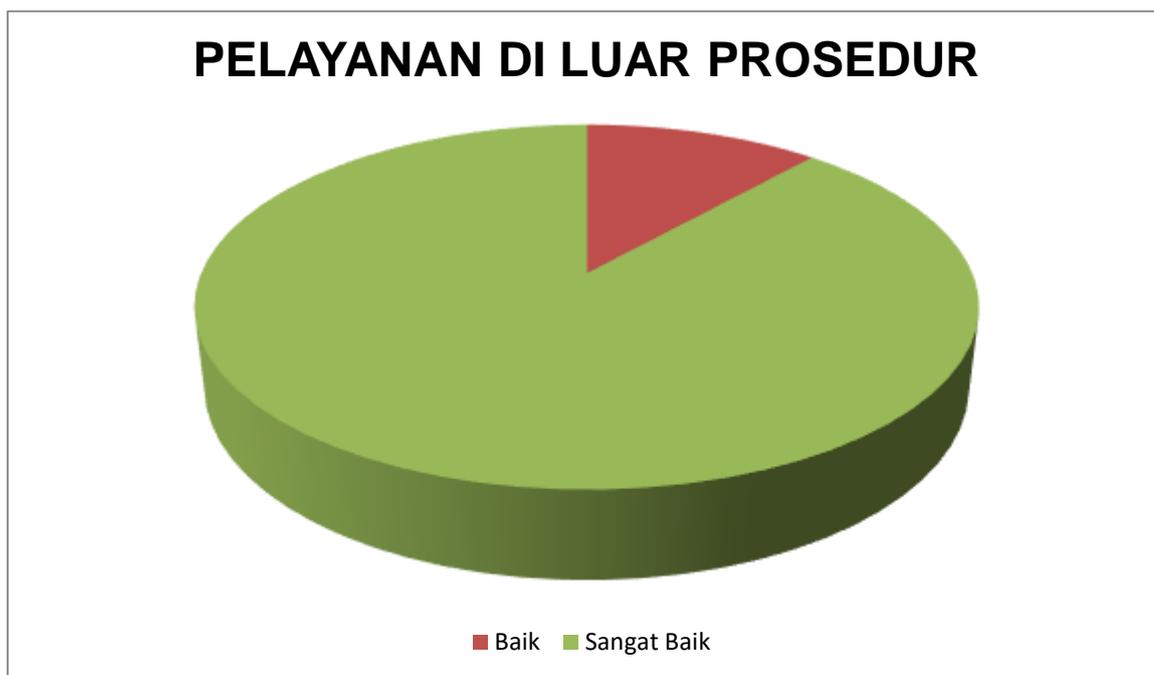
Gambar 3. 4
Diagram Persentase Indikator Diskriminasi Pelayanan

2. Indikator Pelayanan Di Luar Prosedur/Kecurangan Pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pelayanan Di Luar Prosedur/Kecurangan Pelayanan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,88**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI** dari tindakan Pelayanan Di Luar Prosedur/Kecurangan Pelayanan.

Tabel 3. 5
Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Indeks Persepsi	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat buruk	0	0%
2.	Buruk	0	0%
3.	Baik	5	11,9%
4.	Sangat baik	37	88,1%
Jumlah		42	100%



Gambar 3. 5
Diagram Persentase Indikator Pelayanan Di Luar Prosedur

3. Indikator Penerimaan Imbalan Di Luar Ketentuan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penerimaan Imbalan Di Luar Ketentuan ini menunjukkan hasil indeks sebesar **3.88**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI** berbentuk Penerimaan Imbalan Di Luar Ketentuan.

Tabel 3. 6
Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

No.	Indeks Persepsi	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat buruk	0	0%
2.	Buruk	0	0%
3.	Baik	5	11,9%
4.	Sangat baik	37	88,1%
Jumlah		42	100%



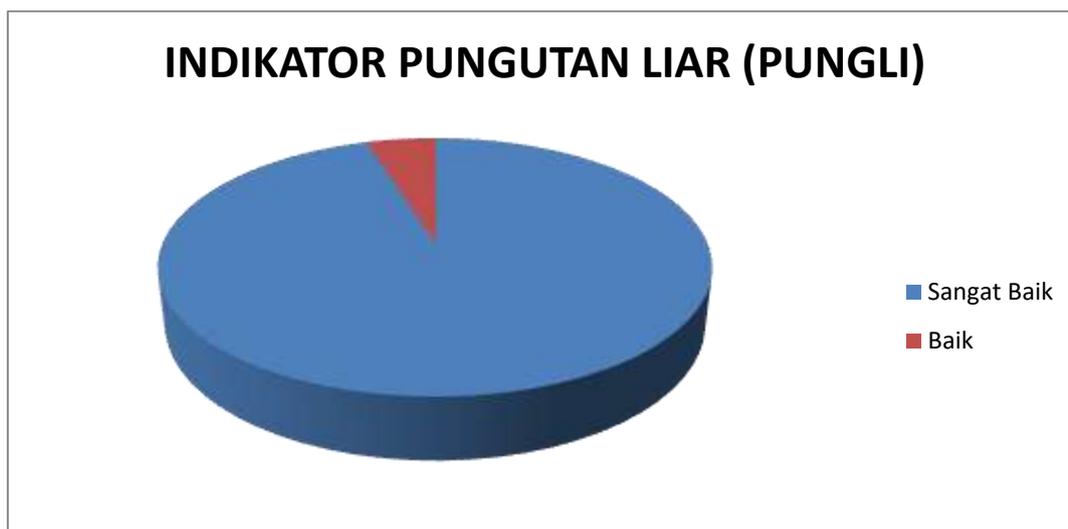
Gambar 3. 6
Diagram Persentase Indikator Menjual Pengaruh

4. Indikator Pungutan Liar (Pungli)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pungutan Liar ini menunjukkan hasil pada indeks **3,95**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI** dalam bidang Pungutan Liar.

Tabel 3. 7
Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya

No.	Indeks Persepsi	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat buruk	0	0%
2.	Buruk	0	0%
3.	Baik	2	4,8%%
4.	Sangat baik	40	95,2%%
Jumlah		42	100%



Gambar 3. 7
Diagram Persentase Indikator Pungutan Liar

5. Indikator Percaloan/Perantara Tidak Resmi

Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,86**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI** dalam bentuk Percaloan/Perantara Tidak Resmi.

Tabel 3. 8
Indeks Pada Indikator Percaloan/Perantara Tidak Resmi

No.	Indeks Persepsi	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat buruk	0	0
2.	Buruk	0	0
3.	Baik	6	14,3%
4.	Sangat baik	36	85,7%
Jumlah		42	100%



Gambar 3. 8
Diagram Persentase Indikator Percaloan

C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Data yang terisi dengan lengkap sejumlah 42 kuisioner dari mulai tanggal 1 Januari 2024 – 3 Mei 2024 pada Pengadilan Agama Maumere, diperoleh Indeks Persepsi Korupsi atas 5 indikator tersebut di atas sebesar **97,25**.

Tabel 3. 9
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maumere

No.	Unsur Pertanyaan	IPK	Konversi
1.	Diskriminasi Pelayanan	3,88	140
2.	Pelayanan Di Luar Prosedur	3,88	140
3.	Penerimaan Imbalan Di Luar Ketentuan	3,88	140
4.	Pungutan liar	3,95	142
5.	Percaloan Perantara Tidak Resmi	3,86	139
TOTAL NILAI		19,45	1404
Rata-rata		3,89	142,2

Indeks **97,25** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **88,31 – 100,00**.

D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangking masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maumere. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10
Isian Masukan Dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Agama Maumere

No.	Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maumere
1.	Agar pelaksanaan sidang keliling dilaksanakan secara bergiliran di wilayah terluar di Kabupaten Sikka untuk mendekatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat
2.	Agar petugas tidak menyalahgunakan kedudukan mereka dan memanipulasi pelayanan
3.	Agar pihak terkait tidak dipertemukan atau diarahkan langsung untuk bertemu dengan pejabat, hakim, dan pihak- pihak tertentu di lingkungan Pengadilan Agama Maumere, untuk menghindari terjadinya kecurangan, suap, dan gratifikasi
4.	Agar pihak yang berperkara memperhatikan dan melaksanakan himbauan penanganan gratifikasi yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, baner, spanduk serta media lainnya

E. Kuisisioner IPAK Triwulan I Tahun 2023

1. Data Pencacah

Nama : Abdullah, S.H., M.H.
NIP : 19700608 200312 1 002

2. Data Unit Pelayanan

Unit Pelayanan : Kepaniteraan
Jenis Pelayanan :
a. Layanan penyelesaian perkara
b. Layanan penyerahan produk pengadilan
c. Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan

3. Data Masyarakat

a. Usia :

Tabel 3. 11
Usia Masyarakat

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1.	<20 Thn	3	8%
2.	20 - 29 Thn	5	21%
3.	30 - 39 Thn	10	42%
4.	40 - 49 Thn	10	17%
5.	> 49 Thn	14	13%
Jumlah		42	24

b. Jenis Kelamin :

Tabel 3. 12
Jenis Kelamin Masyarakat

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	26	62%
2.	Perempuan	16	38%
Jumlah		42	100%

c. Pendidikan Terakhir :

Tabel 3. 13
Pendidikan Terakhir Masyarakat

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1.	Tidak Sekolah	1	2,33%
2.	Sekolah Dasar (Sederajat)	15	34,88%
3.	Sekolah Menengah Pertama (Sederajat)	3	6,98%
4.	Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan (Sederajat)	11	25,58%
5.	Diploma IV/Strata I	10	23,26%
6.	Strata II	3	6,98%
Jumlah		42	100%

d. Pekerjaan Utama :

Tabel 3. 14
Pekerjaan Utama Masyarakat

No.	Pekerjaan Utama	Jumlah	Persentase
1.	Belum/tidak bekerja	1	2,33%
2.	Mengurus rumah tangga	12	27,91%
3.	Pelajar/Mahasiswa	3	6,98%
4.	Pegawai Negeri Sipil	3	6,98%
5.	Petani/pekebun	2	4,65%
6.	Nelayan/perikanan	12	27,91%
7.	Karyawan swasta	3	6,98%
8.	Dosen	1	2,33%
9.	Pengacara	2	4,65%
10.	Pedagang	4	9,30%
Jumlah		42	100%

e. Jenis Layanan :

Tabel 3. 15
Jenis Layanan

No.	Pekerjaan Utama	Jumlah	Persentase
1.	Layanan penyelesaian perkara	16	37,21%
2.	Layanan penyerahan produk pengadilan	14	32,56%
3.	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan	13	30,23%
Jumlah		42	24

4. Data Responden IPAK

Terlampir

BAB IV

PENUTUP

A. Hasil Survei Persepsi Korupsi

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Maumere diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Agama Maumere memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,87** atau masuk pada kategori Bebas dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 5 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

- a. Unsur Diskriminasi Pelayanan dengan nilai 3,88
- b. Pelayanan Di Luar Prosedur dengan nilai 3,88
- c. Penerimaan Imbalan Di Luar Ketentuan dengan nilai 3,88
- d. Pungutan liar dengan nilai 3,95
- e. Percaloan Perantara Tidak Resmi dengan nilai 3,86

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Maumere Periode 1 Januari – 3 Mei 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas **3,87** atau masuk pada persepsi Bebas dari Korupsi. Ditambah nilai yang diberikan oleh responden tidak ada yang memberikan kurang dari 3 dan beberapa indikator ada yang menunjukkan peningkatan nilai kumulasi. Namun dari kelima indikator penyusun tersebut menunjukkan ada beberapa indikator yang mengalami nilai yang paling kecil, yaitu Indikator Percaloan/Perantara Tidak Resmi.

Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap hasil survei tersebut Tim Survei IPK merekomendasikan agar dibentuk Tim Telusur apakah di Pengadilan Agama Maumere terdapat praktik Percaloan/Perantara Tidak Resmi yang terjadi di Pengadilan Agama Maumere, sehingga dapat diketahui keberadaannya faktor tersebut dan perlu dilakukan penguatan pengawasan dari pimpinan terkait adanya indikasi Percaloan/Perantara Tidak Resmi oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere.

B. Tindak Lanjut Yang Dilakukan

Menindaklanjuti hasil tersebut, Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan program sebagai berikut:

1. Dibuatkan Tim Penelusuran dan Investigasi tentang indikasi adanya praktik Percaloan/Perantara Tidak Resmi di Pengadilan Agama Maumere;

2. Optimalisasi penanganan pengaduan oleh masyarakat;
3. Monitoring secara berkala dari pimpinan dalam mencegah terjadinya praktik Percaloan/Perantara Tidak Resmi.

Ditetapkan di : Maumere
Tanggal : 06 Mei 2024
Ketua ZI
PA Maumere,



Achmad Iftauddin, S.Ag.

LAMPIRAN APLIKASI SURVELAG DITJEN BADILAG

The screenshot displays the SURVELAG application interface. At the top, there is a blue navigation bar with the SURVELAG logo, a 'Dashboard' button, and a 'Survei' button. Below the navigation bar, the main header reads 'Survei Pelayanan Publik PA MAUMERE' with a sub-header 'Halaman Survei'. The main content area is titled 'SI SURTI (SISTEM SURVEI TERINTEGROSI)'. A progress bar shows four stages: 'Layanan' (100%), 'Data Responses' (0%), 'Form Kuisan' (0%), and 'KIM & Scan' (0%). Below the progress bar, the text 'Layanan yang Anda dapatkan' is followed by 'Maka si identifikasi dengan yang sebenarnya :'. A text input field contains the text 'Layanan penyelesaian perkara'. At the bottom of the input field are two buttons: 'Kembali' and 'Selanjutnya >'. The bottom of the screen features a mobile navigation bar with icons for home, search, and other functions.

Survei Pelayanan Publik PA MAUMERE

Halaman: Survei

SI SURVI | SISTEM SURVEI TERINTEGIRASI



Identitas Responden

Kami meminta terimakasih data pribadi anda

Nama Responden

NIK (Nomor Identitas)

Nomor Ponsel Responden

Surti Kalilaga

5307614690910001

082145305575

Email

Jenis Kelamin

Usia

ecourgetamere@gmail.com

Laki-Laki

22 tahun

Pekerjaan

Pendidikan

Alumni

Diploma M/Strata I

Dengan saya mengisi data ini dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

[← Kembali](#)

[Selanjutnya >](#)

Some Resistor Problems Multiple

Question 6/10



Answer: 100% (Correct) Full
 Multiple choice and single best answer questions are marked as correct. 20/20 (100%) 20/20 (100%) 20/20 (100%)

1. What is the maximum power that can be dissipated in a resistor with a resistance of 100 Ω and a voltage of 10 V across it?

- 1 W
- 10 W
- 100 W
- 1000 W

2. A resistor with a resistance of 100 Ω is connected in series with a 10 V DC source. What is the power dissipated in the resistor?

- 1 W
- 10 W
- 100 W
- 1000 W

3. A resistor with a resistance of 100 Ω is connected in parallel with a 10 V DC source. What is the power dissipated in the resistor?

- 1 W
- 10 W
- 100 W
- 1000 W

4. A resistor with a resistance of 100 Ω is connected in series with a 10 V DC source. What is the power dissipated in the resistor?

- 1 W
- 10 W
- 100 W
- 1000 W

5. A resistor with a resistance of 100 Ω is connected in parallel with a 10 V DC source. What is the power dissipated in the resistor?

- 1 W
- 10 W
- 100 W
- 1000 W

6. A resistor with a resistance of 100 Ω is connected in series with a 10 V DC source. What is the power dissipated in the resistor?

- 1 W
- 10 W
- 100 W
- 1000 W

7. A resistor with a resistance of 100 Ω is connected in parallel with a 10 V DC source. What is the power dissipated in the resistor?

- 1 W
- 10 W
- 100 W
- 1000 W

8. A resistor with a resistance of 100 Ω is connected in series with a 10 V DC source. What is the power dissipated in the resistor?

- 1 W
- 10 W
- 100 W
- 1000 W

9. A resistor with a resistance of 100 Ω is connected in parallel with a 10 V DC source. What is the power dissipated in the resistor?

- 1 W
- 10 W
- 100 W
- 1000 W

10. A resistor with a resistance of 100 Ω is connected in series with a 10 V DC source. What is the power dissipated in the resistor?

- 1 W
- 10 W
- 100 W
- 1000 W

11. A resistor with a resistance of 100 Ω is connected in parallel with a 10 V DC source. What is the power dissipated in the resistor?

- 1 W
- 10 W
- 100 W
- 1000 W

12. A resistor with a resistance of 100 Ω is connected in series with a 10 V DC source. What is the power dissipated in the resistor?

- 1 W
- 10 W
- 100 W
- 1000 W

13. A resistor with a resistance of 100 Ω is connected in parallel with a 10 V DC source. What is the power dissipated in the resistor?

- 1 W
- 10 W
- 100 W
- 1000 W

14. A resistor with a resistance of 100 Ω is connected in series with a 10 V DC source. What is the power dissipated in the resistor?

- 1 W
- 10 W
- 100 W
- 1000 W

1/10 Next Previous



Dashboard

Home | Dashboard

Jenis Periode
Per TriwulanTahun Periode
2024Tahun Periode
Triwulan II

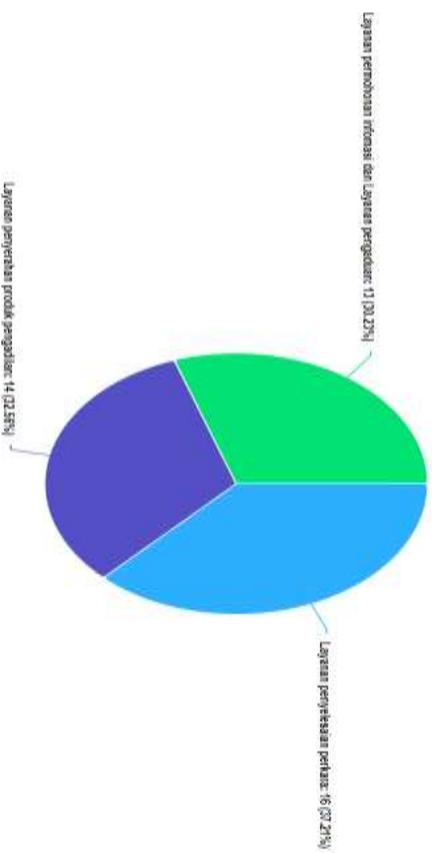
Q. FILTER PERIODE

STATISTIK SURVEI

Periode Triwulan 2 Tahun 2024

4,3
Data Responden3,73
Indeks Kepuasan Masyarakat3,77
Indeks Persepsi Korupsi Pelayanan3,87
Indeks Persepsi Anti Korupsi

Jenis Layanan



Tabulasi Responden dan Respon

No	Identitas Nama	Telp	Email	Jenis Layanan	Survei Persepsi Anti Korupsi					Saran	
					1	2	3	4	5		Indeks
1	Abdul Wahid bin Iramadi	08*****2226	ab*****12@gmail.com	Layanan penyerahan produk pengadilan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	
2	Abdul Wahid bin Iramadi	08*****2226	ab*****12@gmail.com	Layanan penyerahan produk pengadilan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	
3	Abdul Wahid bin Iramadi	08*****2226	ab*****12@gmail.com	Layanan penyerahan produk pengadilan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	
4	Rosneli binti Ramba	08*****0588	ro*****60@gmail.com	Layanan penyerahan produk pengadilan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	Pelayanan ramah dan responsif
5	Suriyanti Masir binti Masir Langga	08*****5390	Ad****pu@gmail.com	Layanan penyerahan produk pengadilan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	
6	Kamaria Maru binti Ahmad Kadha	08*****2370	ug*****00@gmail.com	Layanan penyerahan produk pengadilan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	
7	Muhammad Rivan Suhandi	08*****4934	ip*****63@gmail	Layanan penyerahan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	

No	Identitas Nama	Telp	Email	Jenis Layanan	Survei Persepsi Anti Korupsi					Saran	
					1	2	3	4	5		Indeks
	bin Burhanuddin			produk pengadilan							
	Zena Xena			Layanan							
8	Tamnge binti Jamaluddin	08*****0888	ze*****12@gmail.com	penyerahan produk pengadilan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	Sudah baik
	Layanan			Layanan							
9	Tryas Apriani binti Efendi	08*****5243	na*****44@gmail.com	penyerahan produk pengadilan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	-
	Layanan			Layanan							
10	Rahman binti Baso	08*****1691	an*****17@gmail.com	penyerahan produk pengadilan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	
	Layanan			Layanan							
11	Rudi bin Wahid	08*****7799	ra*****i5@gmail.com	penyerahan produk pengadilan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	-
	Layanan			Layanan							
12	SUPARDI	08*****9137	ye*****22@gmail.com	penyerahan produk pengadilan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	BAGUS
	Layanan			Layanan							
13	SUPARDI	08*****9137	ye*****22@gmail.com	penyelesaian perkara	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	PELAYANAN NYA MUDAN DAN CEPAT
	Layanan			Layanan							
14	Harli bin La Rasuwi	08*****0681	mo*****i4@gmail.com	Layanan permohonan infomasi dan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	

No	Identitas Nama	Telp	Email	Jenis Layanan	Survei Persepsi Anti Korupsi					Saran	
					1	2	3	4	5		Indeks
15	Fachry Khaedar Ali	08*****4656	fa*****22@gmail.com	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.6	Selalu maju dan berkembang, utamakan kenyamanan pelayanan.
16	Nursia Asis	08*****3140	su*****ng@gmail.com	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	
17	Aisyah Nafrayanti Ainun binti Ahmad Edi	08*****5870	na*****un@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.6	-
18	Abdul Wahid bin Iramadi	08*****2226	ab*****12@gmail.com	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	-
19	Ernawati Londa	08*****7321	er*****a3@gmail.com	Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	Baguuus
20	Mimi binti Nudi	08*****5575	su*****ng@gmail.com	Layanan penyerahan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	Tidak ada

No	Identitas Nama	Telp	Email	Jenis Layanan	Survei Persepsi Anti Korupsi					Saran	
					1	2	3	4	5		Indeks
21	Mauresti Dwi		ar*****23@gmail.com	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	
22	Danar Aswim	08*****0015	da*****im@gmail.com	Layanan penyerahan produk pengaduan	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3	
23	Danar Aswim	08*****0015	da*****im@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.4	
24	Miftakhuddin	08*****7362	ta*****11@gmail.com	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	pelayanan permohonan sudah baik
25	Muhtar bin Abdullah	08*****3869	mu*****70@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	bagus
26	Maming bin H. Lanto	08*****0588	ro*****60@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.4	Harap perbanyak pegawai di bidang pelayanan
27	Umar A Gani bin Abdul Gani	08*****2226	ug*****00@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.6	

No	Identitas Nama	Telp	Email	Jenis Layanan	Survei Persepsi Anti Korupsi					Saran	
					1	2	3	4	5		Indeks
28	Pitra Eka Romadhon bin Agus Dwiyono	08*****4760	ma*****47@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.8	Memudahkan pelayanan karena terbantu dengan adanya sidang telekonferensi
29	Rahman binti Baso	08*****1691	an*****17@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.8	
30	Siti Astati binti Jaling Waning	08*****5099	si*****i4@gmail.com	Layanan permohonan informasi dan pengaduan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	-
31	Murati binti La Dini	08*****1804	ra*****31@gmail.com	Layanan permohonan informasi dan pengaduan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	Tidak ada
32	Rizky Ayu Bestari binti Suswanto	08*****7953	qi*****27@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.8	Pelayanan maksimal
33	tamala	08*****9735	ta*****98@gmail.com	Layanan permohonan informasi dan pengaduan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	berikan pelayanan yang maksimal
34	DARMAN	08*****5987	la*****27@gmail.com	Layanan permohonan informasi dan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	Bantulah Mahluk yang ada di Bumi maka pasti yang di

No	Identitas Nama	Telp	Email	Jenis Layanan	Survei Persepsi Anti Korupsi					Saran	
					1	2	3	4	5		Indeks
				Layanan pengaduan							Langit akan membantumu
35	Feri Megantara bin Sufni	08*****3396	fe*****62@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	Ruang pelayanan dingin dan nyaman
36	Mimi alias Mini binti Nudi	08*****5575	su*****ng@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.8	bagus
37	Ramadhan Woda Budo bin Abdullah Budo Bela	08*****2370	um***wi@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	
38	Abdul Wahid bin Iramadi	08*****2226	ab*****12@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	Sudah bagus dan cepat
39	Suryani binti La Poto	08*****2066	an*****48@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.8	-
40	Tryas Apriani binti Efendi alias Apendi	08*****5243	na*****44@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	Tingkatkan waktu pelayanan
41	Yunita Kasanova	08*****5046	yu*****55@gmail.com	Layanan penyelesaian perkara	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4	Tidak ada
42	Ilmam Prabowo	08*****3201	im*****39@gmail.com	Layanan permohonan infomasi dan	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.8	Meningkatkan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan

Identitas		Telp	Email	Jenis Layanan	Survei Persepsi Anti Korupsi					Saran	
No	Nama				1	2	3	4	5		Indeks
				Layanan pengaduan							masyarakat pencari keadilan



PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Jalan Diponegoro, Kel. Wolomarang, Kec.

Alok Barat, Kab. Sikka, Nusa Tenggara

Timur - 86115



(0382) 21134/ 23514



pa-maumere.go.id



pa.maumere@gmail.com